

## BAB II

### TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

#### A. KAJIAN TEORI

##### a. Teori Agensi (*Agency Theory*)

*Agency theory* menjelaskan tentang hubungan antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principle*) yang memiliki hubungan kontraktual (berlawanan arah). Menurut Jansen dan Mackeling (1976), Hubungan *agency relationship* tersebut yang memunculkan teori agensi dimana manajemen (*agent*) tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan *value* sesuai yang diinginkan oleh pemegang saham (*principle*). Namun, kenyataannya kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda sehingga terjadilah permasalahan atau konflik diantara kedua belah pihak tersebut.

Beberapa asumsi dasar yang membangun teori ini adalah adanya *agency conflict* dan *agency problem* (Alijoyo, 2004). *Agency conflict* yang muncul dalam hubungan agen dengan principal adalah sebagai akibat dari keinginan agen atau manajemen untuk melakukan tindakan dengan mengutamakan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan principal untuk memperoleh return dan nilai jangka panjang perusahaan. *Agency conflict* muncul pada berbagai hal yaitu sebagai berikut:

1. *Moral-Hazard*

Pada konteks ini, manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri dan bukan memilih investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Misalnya, manajemen melakukan investasi yang bisa meningkatkan nilai individu manajer walaupun biaya penugasannya tinggi, sehingga manajer akan berada pada posisi untuk mengekstrak tingkat remunerasi yang lebih tinggi dari perusahaan.

2. *Earning Retention*

Dalam hal ini manajemen lebih cenderung untuk mempertahankan tingkat return perusahaan yang stabil dan hal ini berbeda dengan keinginan pemegang saham yang lebih cenderung menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif (*internal positive investment opportunities*).

3. *Risk Aversion*

Manajemen cenderung tidak berani mengambil keputusan investasi yang dianggap menambah resiko bagi perusahaannya. Dalam hal ini mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam jangkauan kemampuan manajer walaupun mungkin hal itu bukan keputusan terbaik bagi perusahaan

4. *Time Horizon*

Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cashflow* perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Artinya, manajemen hanya berpihak pada proyek jangka pendek dengan pengembalian akuntansi

yang lebih tinggi (*short term high accounting return project*) dibandingkan dengan proyek jangka panjang dengan pengembalian NPV positif yang jauh lebih besar.

Asumsi dasar lainnya yang membangun *agency theory* adalah adanya *Agency Problem*. *Agency problem* muncul karena adanya kesenjangan antara kepentingan manajemen sebagai pengelola dengan pemegang saham sebagai pemilik. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikan mendapatkan return yang maksimal sedangkan manajemen memiliki kepentingan agar memperoleh *incentive* atas pengelolaan dana pemilik

#### **b. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)**

Menurut teori ini masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik.

O'Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Tingginya senjangan legitimasi sebagai akibat ketidaksesuaian antara aktivitas operasi perusahaan terhadap

ekspektasi masyarakat memunculkan tekanan dari stakeholder. Pengurangan senjangan legitimasi dapat dilakukan melalui strategi legitimasi, dengan cara meningkatkan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) dan memperluas pengungkapan, termasuk pengungkapan sosial (*social disclosure*) sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan operasi perusahaan atas berbagai dampak yang ditimbulkan.

Pattern (dalam Hadi, 2011:92) menyatakan upaya yang diperlukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif, yaitu dengan cara: melakukan identifikasi dan komunikasi atau dialog dengan publik, melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan dan melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggungjawab sosial (*social responsibility*).

### **c. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)**

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberi manfaat bagi *stakeholder*. Fenomena seperti ini terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi (Harahap, 2001). Untuk itu, tanggungjawab sosial perusahaan yang semula diukur sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap *stakeholder*, baik pihak internal maupun eksternal.

Perusahaan hendaknya memperhatikan kepentingan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Berdasarkan pada asumsi dasar teori stakeholder, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta menempatkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan going concern (Adam, 2004). Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi yang semata-mata diukur dengan economic measurement yang cenderung shareholder orientation, ke arah memperhitungkan faktor sosial (*social factors*) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*stakeholder orientation*).

**d. *Good Corporate Governace* (GCG)**

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam lingkup pasar modal bila secara konsisten diterapkan dalam perusahaan maka akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing.

## 1) Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Effendi (2009) prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang disusun oleh OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) terdiri dari 5 aspek yaitu:

- a) *Transparansi (transparency)*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkap informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b) *Akuntabilitas (accountability)*, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c) *Pertanggungjawaban (responsibility)*, adalah (kesesuaian) kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku;
- d) *Kemandirian (independency)*, merupakan suatu keadaan dimana prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif;
- e) *Kewajaran dan kesetaraan (fairness)*, yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2) Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah bagian dari anggota dewan komisaris yang bersifat independen, artinya tidak ada hubungan bisnis atau hubungan lainnya dengan perusahaan sehingga diharapkan dapat bertindak independen atau tidak memihak pihak manapun di dalam perusahaan

Keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Bursa Efek Jakarta melalui Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1-A Huruf G.7 disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Ada beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut:

- a) Komisaris independen haruslah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan
- b) Komisaris independen haruslah tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c) Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur

dan atau komisaris lainnya dalam perusahaan tercatat yang bersangkutan.

### 3) Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu tugas dan fungsinya sehubungan dengan proses pelaporan khususnya pelaporan keuangan dan memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan.

Keberadaan komite audit di Indonesia berdasarkan peraturan BAPEPAM melalui Surat Edaran Nomor: SE-03/PM/2000 dalam kerangka *good corporate governance* (GCG) merekomendasikan bahwa setiap emiten dan perusahaan publik harus memiliki komite audit dan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang salah satu diantaranya haruslah komisaris independen yang juga merangkap jabatan sebagai ketua komite audit. Kewajiban ini haruslah dipenuhi selambat-lambatnya 31 Desember 2001. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab secara langsung terhadap dewan komisaris.

Menurut surat edaran dari Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 berisikan tugas dan wewenang dari komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris untuk:

- a) Membantu meningkatkan kualitas pelaporan
- b) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.



- c) Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit.
- d) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

#### **4) Kepemilikan Saham Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan serta institusi lainnya pada akhir tahun (Pratanda, et.al 2014). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.

Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama peseorangan pribadi (Sutedi, 2011). Adanya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusional diharap dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam pengungkapan laporan kinerja keuangan dan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusional maka diharap semakin tinggi performa kinerja keuangan yang diungkap dan semakin luas pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

**e. *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Sebagaimana dijelaskan oleh Darwin (dalam Anggraini, 2006), pertanggungjawaban sosial adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomitmen dengan ukuran keuntungan secara finansial saja, tetapi juga harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan UU No.40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2 bagian C menjelaskan bahwa selain menyampaikan tanggung jawab berupa laporan keuangan, perusahaan wajib melaporkan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya perusahaan melaporkan semua aspek yang mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan kepada masyarakat.

Menurut Untung (2008) menyatakan bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain: mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, peluang mendapatkan penghargaan. Pelaksanaan Corporate Social Performance maupun CSR sendiri, dilandasi

oleh pilihan yang berada di dalam domain etika bisnis (*business ethics*) dari para pelaku bisnis. Pelaksanaan juga dilandasi oleh konsep stakeholder management yang mengakui adanya pemegang kepentingan lain diluar pemegang saham dan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada para stakeholder ini.

Pelaksanaan CSR juga dilandasi oleh adopsi konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan menerapkan alat ukur yang dikenal dengan *Triple Bottom Line (TBL)*, yaitu *economic growth*, *social welfare*, dan *environmental protection*. Ketiga dimensi ini harus dikelola sedemikian rupa dalam suatu manajemen berkelanjutan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup.

#### **f. Kinerja Keuangan Perusahaan**

Kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan yang dibuat secara terus menerus oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Samsinar, 2010). Laporan tahunan suatu perusahaan merupakan salah satu sumber informasi guna mendapatkan gambaran kinerja perusahaan. Informasi ini diberikan oleh pihak manajemen perusahaan sebagai gambaran tentang kinerja perusahaan kepada para stakeholder (Titisari dalam Natalylova, 2013).

Dalam mewujudkan visi dan misi, perusahaan perlu memiliki suatu ukuran untuk mengukur bagaimana pencapaian sasaran dan tujuan dalam periode waktu tertentu yaitu dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik gambaran perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat membuahkan hasil dan tindakan yang diharapkan. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Munawir (2002), profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri atau untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat hasil yang memadai (*reasonable return*) dari aset yang dikuasainya atau didefinisikan sebagai laba bersih (*operating income*).

## **B. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian ini menggunakan beberapa studi empiris atau penelitian terdahulu sebagai sumber referensi yaitu diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (tahun)	Hasil Penelitian
1.	Yuni Tri Lestari dan Nur Fadrijh Asyik (2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corporate Governance yang diproksi kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i>.</li> <li>2. Variabel kepemilikan saham institusional, ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, tetapi kepemilikan saham manajerial dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.</li> <li>3. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.</li> <li>4. <i>Corporate Social Responsibility</i> bukan sebagai variabel intervening antara <i>Corporate Governance</i> dan kinerja keuangan perusahaan</li> </ol>
2.	Etty Murwaningsari (2009)	<p>Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Good Corporate Governance</i> yang diamati melalui kepemilikan manajerial dan institusional, mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggraini (2006). Namun temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Widyasari dan Rahman (2007), Barnea dan Rubin (2006).</li> <li>2. Demikian pula dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap CSR, dalam penelitian Barnea dan Rubin (2006) tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan.</li> <li>3. Sementara itu, CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Temuan tersebut sejalan dengan Lajili dan Zeghal (2006); Preston (1978) Namun temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan Hackston</li> </ol>

		<p>dan Milne (1996).</p> <p>4. Pengujian variabel kontrol yaitu <i>CEO Tenure</i> mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sementara itu Jenis Industri tidak mempunyai pengaruh terhadap CSR. <i>Corporate Secretary</i> dan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan</p>
3.	Maria Fransisca Widyati (2013)	<p>1. Dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan.</p> <p>2. Secara parsial komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.</p> <p>3. Akan tetapi, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.</p>
4.	Laksana (2015)	<p>1. Jumlah dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>3. Proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p>
5.	Muhasryahbana (2012)	<p>1. Komisaris independen berpengaruh negative signifikan terhadap CSR</p> <p>2. Komite audit berpengaruh negative signifikan terhadap CSR</p> <p>3. Kepemilikan manajerial berpengaruh negative signifikan terhadap CSR</p> <p>4. Kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan terhadap CSR</p>
6.	Yuniasih dan Wirakusuma (2010)	<p>1. Kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan</p> <p>2. CSR memoderasi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan</p>
7.	Anggraini (2016)	<p>1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh</p>

		<p>terhadap pengungkapan informasi social</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi social</li> <li>3. Size tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi social</li> <li>4. Jenis industry tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi social</li> <li>5. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi social</li> </ol>
8.	Rahmayanty (2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan public berpengaruh signifikan terhadap CSR</li> <li>2. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap CSR</li> <li>3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>4. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap CSR</li> </ol>
9.	Anwar (2010)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja keuangan ROA, ROE dan EVA berpengaruh positif terhadap CSR (secara simultan)</li> <li>2. ROA, ROE, EVA dan CSR berpengaruh positif terhadap harga saham</li> <li>3. ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham</li> <li>4. ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham</li> <li>5. EVA berpengaruh signifikan terhadap harga saham</li> <li>6. CSR berpengaruh signifikan terhadap harga saham</li> <li>7. ROA, ROE, EVA, CSR berpengaruh secara simultan terhadap harga saham</li> <li>8. CSR berpengaruh positif terhadap hubungan kinerja keuangan dan harga saham</li> </ol>
10.	Badjuri (2011)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leverage tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>3. Kepemilikan public tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>4. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap CSR</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>6. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>7. Komite audit tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>8. Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap CSR</li> <li>9. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap CSR</li> <li>10. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap CSR</li> </ol>
11.	Darwis (2009)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> <li>2. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan</li> <li>3. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> <li>4. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> </ol>
12.	Sembiring (2005)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap CSR</li> <li>2. Profil perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap CSR</li> <li>3. Dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap CSR</li> <li>4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>5. Leverage tidak berpengaruh terhadap CSR</li> </ol>
13.	Putri (2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>2. Kepemilikan asing berpengaruh negative signifikan terhadap CSR</li> <li>3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>4. Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap CSR</li> </ol>
14.	Siallagan dan Machfoedz (2006)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba</li> <li>2. Dewan komisaris berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laba</li> <li>3. Komite audit berpengaruh positif signifikan</li> </ol>



		<p>terhadap kualitas laba</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan</li> <li>5. GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan</li> <li>6. Kualitas laba bukan variabel intervening GCG terhadap nilai perusahaan</li> </ol>
15.	Manik (2011)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap KK</li> <li>2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap KK</li> <li>3. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap KK</li> <li>4. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap KK</li> <li>5. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap KK</li> </ol>
16.	Suryono dan Prastiwi (2011)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap CSR</li> <li>2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>3. Leverage tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>4. Aktivitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR</li> <li>5. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap CSR</li> <li>6. Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap CSR</li> <li>7. Dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap CSR</li> <li>8. Governance committee tidak berpengaruh terhadap CSR</li> </ol>

## C. PERUMUSAN HIPOTESIS

### a. Pengaruh komisaris independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komisaris Independen adalah proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Menurut Fama & Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena komisaris independen bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan *good corporate governance*. Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Sekaredi (2011) melakukan penelitian mengenai “*Board Composition Manajerial Ownership and Firm Performance*”, yang membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outsider director* (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board*, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Dengan demikian jumlah komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik. Dari perspektif agensi teori, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen yang mementingkan dirinya sendiri dengan melakukan manajemen laba yang akan berdampak pada laporan keuangan perusahaan, sehingga keberadaan komisaris independen

sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan**

**b. Pengaruh komisaris independen Terhadap *Corporate Social Responsibility***

Dewan komisaris sebagai puncak dari system pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Komposisi dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktik dan pengungkapan CSR. Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota komisaris independen dalam proporsi dewan komisaris maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan semakin efektif. Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat berupa pengawasan kepada manajer agar tidak bertindak oportunistik, mengawasi manajer agar tidak keluar dari nilai dan tujuan perusahaan serta mengawasi kebijakan perusahaan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip GCG yaitu transparan, akuntabel, adil dan bertanggung jawab baik terhadap *shareholder* maupun *stakeholder* lainnya yakni masyarakat dan lingkungan. Berkaitan dengan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, komisaris independen akan mendorong jajaran direksi untuk selalu menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain memberi dorongan, komisaris independen

akan mengawasi dan mengendalikan manajer untuk mengungkapkan CSR sebaik-baiknya agar memenuhi jumlah item pengungkapan CSR.

Selain sebagai tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa CSR dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholders*. Legitimasi atau dukungan dari *stakeholders* akan bermanfaat bagi kelangsungan aktivitas bisnis perusahaan yang dalam jangka panjang akan memberikan efek peningkatan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, komisaris independen akan mendorong manajer untuk melaksanakan pengungkapan CSR karena efek jangka panjangnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan analisis dan kajian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H2 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*.**

**c. Pengaruh Jumlah Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Komite audit merupakan pihak independen yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit berperan untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Komite audit juga memiliki peran untuk mengawasi pengendalian internal perusahaan dan juga pelaporan keuangannya.

Komite audit berperan untuk mengawasi dan menjembatani hubungan auditor internal dan eksternal sehingga pelaporan keuangan perusahaan dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya komite audit, diharapkan mampu menciptakan laporan keuangan yang relevan dan bebas dari manipulasi pihak manapun sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi bagi manajemen. Komite audit juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang transparan dan nantinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan

Menurut McMullen (1996) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan Manik (2011) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan pemaparan di atas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

**H3 : Komite audit berpengaruh terhadap berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.**

**d. Pengaruh Komite audit Terhadap *Corporate Social Responsibility***

Untuk mendukung implementasi *Good Corporate Governance*, maka dibentuklah struktur tambahan dalam peseorangan yaitu komite audit perusahaan. Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris dan

diketahui oleh komisaris independen dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari dewan komisaris untuk melakukan mekanisme pengawasan terhadap manajemen (Surat Keputusan Ketua BAPEPAM KEP-29/PM/2004).

Putri (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang independen karena diketuai oleh komisaris independen akan cenderung lebih peka terhadap kinerja sosial dan mencegah tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran lingkungan. Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 121 menjelaskan bahwa Komite Audit beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berasal dari Dewan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Komite audit membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris terutama dalam hal pengawasan terhadap informasi keuangan dan aktivitas akuntansi perusahaan. Selain itu, komite audit juga bertugas untuk melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten. Komite audit mengetahui regulasi-regulasi pemerintah tentang aktivitas perusahaan, sehingga komite audit akan mendorong manajemen untuk melaksanakan regulasi tersebut. Tak terkecuali dengan CSR yang telah ditetapkan kebijakannya oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, komite audit juga melakukan pengawasan dan mendorong kegiatan CSR serta pelaporan yang berupa laporan berkelanjutan.

Jumlah anggota komite audit yang semakin tinggi diharapkan dapat melakukan pengawasan dan mendorong manajemen untuk mengungkapkan CSR sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Pada akhirnya, jika CSR yang dilakukan perusahaan berkualitas maka akan semakin banyak item pengungkapan CSR yang diungkapkan dalam laporan berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4 : Komite audit berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*.**

**e. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Menurut Jensen & Mackelng (1976) menyatakan bahwa dalam perusahaan sering kali terjadi konflik antara pemegang saham dengan manajer. Konflik tersebut muncul karena perbedaan kepentingan antara keduanya. Manajer biasanya bertindak oportunis (mementingkan kepentingan dirinya sendiri) yang mana hal tersebut tidak disukai oleh investor atau pemegang saham. Untuk mengurangi konflik tersebut maka diperlukan pengawasan yang dapat mengontrol tindakan manajer

perusahaan. Salah satu proses pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh pemegang saham mayoritas yang biasanya merupakan sebuah institusi yang memiliki perusahaan tersebut. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan eksternal, sehingga manajer tidak akan bertindak opportunistik yang dapat meningkatkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Dengan demikian manajer akan bertindak selaras dengan kepentingan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut penelitian Murwaningsari (2009) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widyati (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan pemaparan di atas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H5 : Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.**

**f. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Corporate Social Responsibility***

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi. Saham yang dimiliki oleh institusi biasanya dalam jumlah yang besar sehingga menjadikan institusi tersebut sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan. Sebagai pemegang saham



mayoritas, tentunya institusi memiliki wewenang untuk mengawasi tindakan manajer agar selaras dengan kepentingan pemegang saham yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Institusi sebagai pemegang saham mayoritas tentunya ingin perusahaannya memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga pemegang saham institusi mendorong manajer untuk melakukan pengungkapan CSR sesuai dengan teori legitimasi dan stakeholder.

Penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dari persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional akan menyebabkan tingkat monitor menjadi lebih efektif, dengan demikian semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan semakin luas. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan Berdasarkan analisis dan kajian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H6 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap  
*Corporate Social Responsibility***

**g. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan  
Perusahaan**

Kinerja keuangan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti keputusan pendanaan, penjualan dan lain-lain. Namun, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dukungan dari para stakeholder perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang mengatakan bahwa perusahaan tidak bisa hidup sendiri namun juga memperhatikan kepentingan para stakeholdernya yaitu untuk mendapatkan legitimasi atau dukungan dari pihak eksternal perusahaan. Dengan didaptkannya dukungan dari stakeholder perusahaan maka kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga, kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang akan meningkat atau menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Untuk mendapatkan legitimasi tersebut, sesuai teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan harus melakukan pengungkapan pertanggung jawaban social untuk menjalin atau menciptakan legitimasi dengan masyarakat atau pihak-pihak eksternal yang terkait dengan perusahaan.

Murwaningsari (2009) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* mempengaruhi kinerja perusahaan artinya semakin banyak perusahaan mengungkapkan laporan keuangan maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh Anwar *et al* (2010) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR memberikan pengaruh positif hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dengan harga saham dipasar modal. Berdasarkan pemaparan di atas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

**H7 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.**

**h. Pengaruh Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility***

Komisaris independen adalah anggota dari dewan komisaris yang bersifat independen dan berasal dari luar perusahaan. Tugas dan fungsi dari komisaris independen adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap manajemen. Harapannya dengan adanya komisaris independen dapat meningkatkan efektifitas serta independensi pengawasan yang dilakukan.

Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Keberadaan komisaris independen akan semakin menambah efektifitas pengawasan yang dapat mengurangi adanya *agency conflict* dan menekan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen. Sehingga, dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan di masa yang akan datang salah satunya dengan pengungkapan CSR.

Hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri namun juga harus memperhatikan kepentingan dari para stakeholder serta

shareholdernya untuk mendapatkan legitimasi atau dukungan dari pihak-pihak tersebut. Menurut teori legitimasi menjelaskan bahwa salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para stakeholdernya adalah dengan melakukan pengungkapan CSR. Dengan didapatkannya legitimasi atau dukungan dari stakeholder perusahaan tentunya akan mempermudah kegiatan operasional perusahaan yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H8 : Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility***

**i. Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility***

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan diketuai oleh komisaris independen dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari dewan komisaris untuk melakukan mekanisme pengawasan terhadap manajemen terutama dalam pengawasan informasi keuangan dan aktivitas akuntansi perusahaan. Komite audit juga bertugas untuk melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan public. CSR yang merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi perhatian komite audit.

Komite audit akan mendorong manajemen dalam melakukan pelaporan informasi yang berkaitan dengan perusahaan seperti laporan keuangan dan laporan berkelanjutan yang transparan. Karena komite audit mendorong pelaporan informasi laporan berkelanjutan yang transparan, maka manajemen akan berusaha untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan pengungkapan CSR yang berkualitas. Pada akhirnya, jika CSR yang dilakukan perusahaan berkualitas maka akan semakin banyak item pengungkapan CSR yang diungkapkan dalam laporan berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pengungkapan CSR selain sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, juga menjadi alat bagi perusahaan untuk meningkatkan legitimasi dari masyarakat. Sesuai dengan teori legitimasi menjelaskan bahwa salah satu sarana komunikasi yang paling efektif untuk menjalin hubungan yang baik dengan *stakeholdernya* adalah melalui pengungkapan CSR. Legitimasi yang didapat dari *stakeholder* diharapkan akan mendorong kinerja perusahaan untuk menjadi lebih baik dalam jangka panjang. Dengan demikian, komite audit akan mendorong manajemen untuk mengungkapkan CSR karena CSR memiliki dampak jangka panjang yang positif bagi kinerja perusahaan

Menurut McMullen (1996) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan-pelaporan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Manik (2011) menunjukkan bahwa komite audit

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan pemaparan di atas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

**H9 : Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility***

**j. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility***

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi dan biasanya dalam jumlah yang besar, sehingga menjadikan kepemilikan institusional menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan. Menurut teori agensi menyatakan bahwa salah cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya agensi konflik adalah dengan adanya kepemilikan institusional karena kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan eksternal yang dilakukan pihak institusi terhadap manajemen sehingga dapat menekan tindakan oportunistik manajemen dan menjadikannya selaras dengan kepentingan pemegang saham yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri namun juga seharusnya memperhatikan kepentingan para stakeholdernya. Salah satu cara yang paling efektif digunakan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para stakeholder perusahaan adalah dengan cara pengungkapan CSR. Dengan

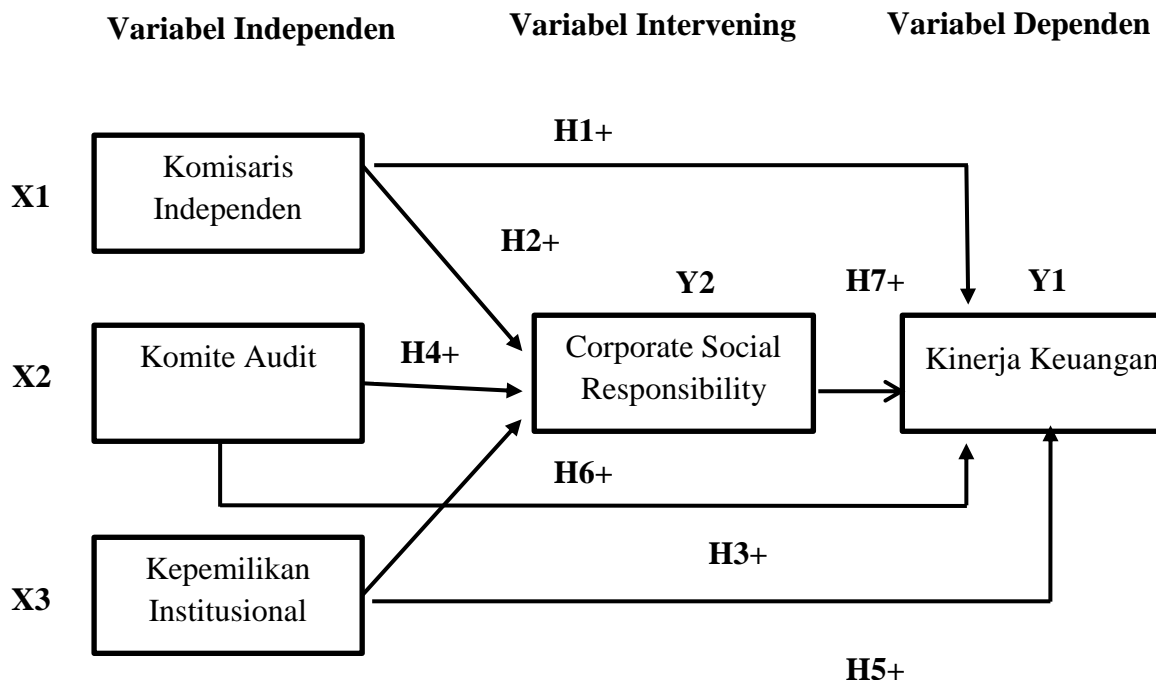
pengungkapan CSR ini harapannya perusahaan akan mendapatkan legitimasi atau dukungan dari pihak-pihak terkait dengan perusahaan sehingga kegiatan operasional perusahaan menjadi lancar dan nantinya akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan dimasa yang akan datang.

Penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dari persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional akan menyebabkan tingkat monitor menjadi lebih efektif, dengan demikian semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan semakin luas.

**H10 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility***

#### D. MODEL PENELITIAN

Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu yang Mendukung Penurunan Hipotesis**

	<b>Hipotesis</b>	<b>Penelitian yang mendukung</b>
<b>H1</b>	Komisaris Independen Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Barnhart dan Rosenstein dalam Sekaredi (2011)
<b>H2</b>	Komisaris Independen Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap CSR	Coller dan Gregory dalam Sarimbing (2005)
<b>H3</b>	Komite Audit Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	McMullen (1996), Manik (2011)
<b>H4</b>	Komite Audit Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap CSR	Putri (2013), Suryono dan Prastiwi (2011)
<b>H5</b>	Kepemilikan Institusional Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Murwaningsari (2009), Widyati (2013)
<b>H6</b>	Kepemilikan Institusional Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap CSR	Murwaningsari (2009), Anggraini (2006)
<b>H7</b>	CSR Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Murwaningsari (2009), Anwar et al (2010)